

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON

EVALUATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR CASH RECEIPTS AT THE REGIONAL REVENUE AND FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY OF TOMOHON CITY

Oleh:
Glady S. M. Angow¹
Ventje Ilat²
Dhullo Afandi³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹gladyangow@gmail.com

²ventje_ilat@unsrat.ac.id

³afandiafandibaksh@gmail.com

Abstrak: Sistem pengendalian internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Salah satu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengarahkan anggota organisasinya di dalam bidang keuangan adalah pengendalian internal terhadap penerimaan kas. Tujuan penelitian ini untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kota Tomohon. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon telah berjalan dengan baik, dan telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur sistem pengendalian internal kas.

Kata Kunci: sistem pengendalian internal, penerimaan kas

Abstract: *The internal control system is very important in supporting the improvement of local government management and is a supporting factor in creating an accountable and transparent government as a reflection of good performance. One of the tools that can be used by management to direct members of their organization in the financial sector is internal control over cash receipts. The purpose of this study was to evaluate the internal control system for cash receipts at the Regional Revenue and Financial Management Agency in Tomohon City. The type of research used is descriptive qualitative. Based on the results of the research conducted, it shows that the internal control system at the Regional Revenue and Financial Management Agency (BPKPD) of Tomohon City has been running well, and has implemented most of the elements of the cash internal control system.*

Keywords: *internal control system, cash receipt*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dituntut untuk mengelola pemerintahan secara profesional dan efisien. Tuntutan ini diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pemerintah agar berupaya melakukan kinerja yang terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah sebuah proses yang terintegrasi dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam suatu lembaga yaitu pimpinan beserta seluruh pegawainya dengan konsisten dan terus menerus dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas berjalannya kegiatan organisasi dengan efektif dan efisien, memiliki laporan keuangan yang dapat diandalkan, adanya sistem pengamanan aset yang memadai, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan terkait dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otoritas yang memadai, memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak pada laporan keuangan pemerintah. Salah satu sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah adalah sistem penerimaan kas.

Penerapan sistem penerimaan kas pada lembaga pemerintah dengan memisahkan fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Pengendalian internal terhadap penerimaan kas harus terintegrasi dalam bentuk tindakan dan kegiatan. Penerapan sistem pengendalian internal terhadap kas adalah hal yang penting bagi setiap instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal terdiri atas lima bagian yang semuanya saling terhubung yaitu Lingkungan Pengendalian yang kondusif, Penilaian Risiko yang cukup dan memadai, Kegiatan Pengendalian untuk menghilangkan dampak atas risiko yang ada, Informasi dan Komunikasi antar elemen pelaksana kegiatan pengendalian serta Pemantauan Pengendalian oleh pimpinan. Sistem pengendalian internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Penyebab lemahnya sistem pengendalian internal mengakibatkan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk dan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar.

Setiap Badan Pendapatan Daerah membutuhkan sarana pengendalian internal agar seluruh kegiatannya terarah pada tujuan yang ditetapkan. Salah satu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengarahkan anggota organisasinya di dalam bidang keuangan adalah pengendalian internal terhadap penerimaan kas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka kebutuhan sistem pengendalian internal sangatlah diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Dengan itu, diharapkan sistem pengendalian internal tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur penyajian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Dengan demikian penerapan Sistem Pengendalian Internal menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperhatikan setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sumber Penerimaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon berasal dari pajak dan retribusi daerah. Sistem penerimaan kas di BPKPD Kota Tomohon terdiri dari sistem pembayaran tunai (manual) dan juga nontunai. Untuk pembayaran nontunai, BPKPD Kota Tomohon sudah langsung terintegrasi dengan sistem Rekening Kas Umum Daerah sehingga meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian transaksi, namun untuk sistem pembayaran tunai (manual), masih sering terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian pencatatan antara buku besar pendapatan/penerimaan dan buku kas umum (Bank). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap sistem pengendalian internal penerimaan kas yang sudah diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon saat ini. Evaluasi ini diperlukan untuk dapat memberikan saran perbaikan atau menindaklanjuti atas temuan-temuan yang telah diperoleh, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan atas fungsi-fungsi yang terkait.

Tujuan Penelitian

Untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kota Tomohon.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Sumarsan (2017:1), Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat

menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Pemerintahan

Pramudiana (2017:23) mengatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atau hasil dari proses yang dilakukan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016), Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, unsur unsur sistem pengendalian adalah sebagai berikut:

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
2. *Risk Assesment* (Penaksiran Resiko)
3. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)
4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)
5. *Monitoring* (Pemantauan)

Pengertian Pengendalian Internal Kas

Menurut Mardiasmo (2018), kas adalah uang tunai baik uang kertas maupun uang logam, simpanan uang di bank yang setiap saat dapat diambil dan bentuk-bentuk alat pembayaran lainnya yang mempunyai sifat seperti mata uang. Kas harus bisa dikendalikan melalui suatu pengendalian internal yang tepat. Pengendalian internal terhadap kas smardiasendiri dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya pemborosan, penyelewengan, dan ketidakefisienan kas yang dimiliki perusahaan.
2. Menjamin ketelitian dan kepercayaan atas keberadaan data akuntansi yang dihasilkan.
3. Mendorong efisiensi operasional perusahaan.
4. Dipatuhinya kebijakan manajemen terkait kas.

Prinsip - prinsip Pengendalian Internal

1. Pemisahan Tugas
Tugas mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas harus dipisah dari tugas menyimpan dan menyetujui pengeluaran kas.
2. Penyetoran ke Bank
Semua penerimaan kas harus segera disetor ke bank.
3. Pemeriksaan Mendadak
Pemeriksaan terhadap catatan dan fisik kas harus dilakukan secara mendadak dan tidak dalam interval tertentu.
4. Menggunakan Cek
Semua pengeluaran kas (kecuali kas kecil) harus dilakukan dengan menggunakan cek.

Sistem Penerimaan Kas

Menurut Sujarweni (2015:96), sistem penerimaan kas merupakan suatu catatan yang berasal dari penjualan tunai, penjualan aset tetap dan pinjaman yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan kas. Penerimaan kas berasal dari transaksi pemerintah maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas pemerintah (Mulyadi, 2016:379). Sumber penerimaan kas terbesar suatu pemerintah berasal dari transaksi setiap pembayaran ke kas daerah. Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud penerimaan kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertumbuhnya saldo kas tunai dan rekening bank milik pemerintah yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer maupun penerimaan lainnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Masanae, Morasa dan Budiarmo (2022) bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan system pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Kantor Kecamatan Malalayang sudah diterapkan dengan baik namun belum maksimal ditandai dengan belum maksimalnya penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia sehingga masih ditemui pegawai yang kurang menguasai terkait pengeluaran kas, juga belum adanya bagian khusus yang dibentuk untuk melakukan pengendalian internal di Kantor Kecamatan tersebut.

Penelitian Fengky, Sabijono dan Kalalo (2019) bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Hotel Yuta Manado. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder berupa struktur organisasi, dokumen, laporan dan buku lainnya. Dengan membandingkannya dengan teori dari COSO (Committee Of Sponsoring Organizations). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Hotel Yuta Manado belum memadai, maka perlu adanya perputaran jabatan, peningkatan sumber daya manusia mengenai hal teknologi dan penambahan alat berupa komputer di bagian kasir.

Penelitian Marpaung (2021) bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hasil sistem pengendalian internal kas dan seberapa sesuai dengan sistem pengendalian yang terdapat pada PP No.60 Tahun 2008. Sistem pengendalian internal dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal pemerintahan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Mixed Method yang menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis data hasil observasi penelitian ini menggunakan metode komparatif berupa persentase. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan sudah baik dilihat dari hasil daftar checklist melalui wawancara dengan hasil 80,55% yang berarti sistem pengendalian internal kas sudah sesuai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

1. Tahap pertama mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara mengenai prosedur penerimaan kas, dokumen - dokumen yang terkait dengan penerimaan kas, sejarah instansi, visi, misi, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan. Data diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon,
2. Tahap kedua melakukan evaluasi berupa perbandingan antara prosedur yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dengan aturan yang berlaku, lalu dilakukan juga analisis berupa pengujian atas terpenuhinya tidaknya setiap prosedur tersebut atas unsur-unsur sistem pengendalian internal berupa Lingkungan Pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan,
3. Tahap ketiga, peneliti menarik kesimpulan dan juga memberikan saran.

Hasil Penelitian**Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon**

1. Sumber Penerimaan Kas

Sumber-sumber penerimaan kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Parkir
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Air Bawah Tanah
10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2. Prosedur Penerimaan Kas

- a. PPKD Menyerahkan SKPD yang telah diterbitkan kepada wajib pajak.
- b. Wajib Pajak Menyerahkan uang (setoran pajak) ke Bank SULUTGO
- c. Setelah selesai pembayaran di bank, bank mengeluarkan slip bukti setoran kepada wajib pajak.
- d. Wajib pajak menukar slip setoran ke Bendahara Penerimaan.
- e. Bendahara Penerimaan mengeluarkan STTS / TBP kepada wajib pajak
- f. Setelah itu bagian pembukuan melakukan pengecekan kembali transaksi pada hari itu dengan menggunakan rekening koran dari bank.

Pelaksanaan Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada BPKPD Kota Tomohon

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon dalam kegiatan operasionalnya telah menerapkan pengendalian internal kas yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pada umumnya, lingkungan pengendalian yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon telah sesuai memenuhi unsur-unsur hal ini tercermin dari pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal. Instansi telah memiliki struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan uraian tugas yang jelas.

2. Penilaian Resiko

Perubahan peraturan dapat mengakibatkan risiko yang berbeda. Akan tetapi pihak instansi berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi terjadinya risiko yang ada khususnya pada bagian kas. Untuk menanggulangi terjadinya risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon menerapkan penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, seluruh dokumen pendukung di cap "Lunas" setelah transaksinya selesai dibayar, bagian arsip selalu memeriksa dokumen-dokumen terkait dalam penerimaan kas, dan semua nomor *check* yang keluar dipertanggung jawabkan oleh bagian keuangan."

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko. Pada kegiatan ini dilakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindakan mengatasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan efektif.

4. Informasi Dan Komunikasi

Sistem Informasi harus diidentifikasi diproses, dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam instansi dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.

5. Pemantauan

Pengawasan terhadap keuangan di instansi ini bukan auditor seperti halnya diperusahaan, tetapi inspektorat atau irjen kemandagri. Tugas mereka memeriksa dokumen-dokumen atas transaksi-transaksi yang terjadi di instansi. Dan pengawasan umum pada instansi di lakukan langsung oleh pimpinan terhadap su-sub bagian yang ada didalam instansi ini walaupun tidak selalu dilakukan.

Pembahasan**Evaluasi Prosedur Penerimaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon**

Penerimaan kas yang ada di Kota Tomohon dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Menurut data lapangan, sistem dan prosedur yang ada di BPKPD Kota Tomohon sudah baik dan mengikuti surat edaran yang mencatat tentang sistem dan prosedur penerimaan kas, namun masih ada kendala yang sementara ditindak lanjuti yaitu ketidaksesuaian pencatatan antara buku penerimaan dan buku kas bank. Untuk upaya yang sementara dilakukan oleh BPKPD Kota Tomohon dalam mengatasi hal tersebut yaitu mengintegrasikan sistem pada server satu dengan server yang lainnya (*host to host*) dengan bank, melakukan rekonsiliasi dengan bank, dan juga melakukan evaluasi data penerimaan dengan bank.

Evaluasi Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada BPKPD Kota Tomohon

No.	Unsur - Unsur SPI	PP No. 60 Tahun 2008	SPI Penerimaan Kas pada BPKPD Kota Tomohon	Keterangan
1.	Lingkungan Pengendalian	a. Penegakan Integritas dan nilai etika	Pemimpin telah menanamkan nilai-nilai integritas kepada para pegawai dengan menerapkan tindakan disiplin terhadap aturan yang berlaku	Sudah sesuai karena menjunjung nilai-nilai integritas dalam kepemimpinan yaitu jujur dan bertanggung jawab
		b. Komitmen terhadap kompetensi	Selalu mengembangkan potensi para tenaga kerja dengan selalu mengarahkan mereka untuk bekerja secara profesional serta memberikan pelatihan-pelatihan	Sudah Sesuai
		c. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Tugas dan wewenang yang diberikan sudah dilakukan dengan tanggungjawab yang tepat	Sudah Sesuai
2.	Penilaian Resiko	Pemimpin wajib melakukan penilaian resiko yaitu dengan menetapkan tujuan instansi pemerintah, tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah	Sudah terdapat tujuan instansi yang memuat pernyataan dan arahan yang telah di komunikasikan pada seluruh pegawai	Sudah Sesuai
3.	Kegiatan Pengendalian	Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi	Dilakukan review kinerja, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pemisahan fungsi	Sudah Sesuai
4.	Informasi dan Komunikasi	Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi juga mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus	Sistem Informasi penerimaan kas pada BPKPD Kota Tomohon sudah baik namun masih ada beberapa kendala dalam aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi sistem yang digunakan belum terintegrasi dengan bank, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan.	Belum Sesuai, namun instansi sudah dalam proses untuk <i>host to host</i> aplikasi.

5.	Pemantauan	menerus Dilaksanakan melalui penilaian sendiri, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal	Melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas program dan juga selalu adanya pengawasan.	Sudah Sesuai
----	------------	---	---	--------------

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sistem pengendalian internal Penerimaan kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem dan Prosedur penerimaan kas BPKPD Kota Tomohon sudah baik dan mengikuti peraturan yang mencatat tentang sistem dan prosedur penerimaan kas, namun ada beberapa upaya yang sementara di tindak lanjuti yaitu ketidaksesuaian pencatatan dan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses belum optimal.
2. Sistem pengendalian internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur sistem pengendalian internal kas yang terdiri dari struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang bertanggung jawab yang sudah sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon.

Saran

1. Untuk instansi terkait agar sistem pengendalian internal dalam kaitannya dengan dalam penerimaan kas agar lebih diperhatikan dan dijalankan dengan semestinya.
2. Sebaiknya pimpinan instansi melakukan pelatihan kepada para pegawai agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, dan melakukan pemisahan fungsi penerimaan dengan fungsi pengeluaran kas agar dapat tercipta sistem pengendalian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fengky, H., Sabijono, H., & Kalalo, M. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Hotel Yuta Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/23218>. Diakses pada 6 Agustus 2022
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marpaung, M. N. A. F. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/12986/>. Diakses pada 12 November 2022
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Masanae, W., Morasa, J., & Budiarto, N. S. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 243-252. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37475>. Diakses pada 18 Juli 2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Internal*.

Pramudiana, A. A. (2017). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarsan, T. (2017). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS Edisi 2*. Jakarta: Indeks

